

**DOKUMEN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KET
1	Terwujudnya Layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	Hasil Survei Integritas Internal Organisasi (dirubah kedalam nilai indeks)	1. Layanan BMN 2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 3. Layanan Protokol 4. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 5. Layanan Umum 6. Layanan Perkantoran 7. Layanan Sarana Internal 8. Layanan Manajemen SDM 9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 10. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 11. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 12. Layanan Manajemen Keuangan 13. Layanan Reformasi Kinerja 14. Layanan Kearsipan	Rp 14,610,692,000	Rp 3,652,673,000	Rp -	TW I		1. Laporan Hasil Survei Integritas Internal Organisasi Triwulan I 2. Laporan Monitoring dan Pelaporan BMN 3. Laporan Pelaksanaan Kehumasan 4. Laporan Pelaksanaan Keptokoleran 5. Laporan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan 6. Laporan Pengelolaan Pengadaan Barjas/UKPBJ 7. Laporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian 8. Laporan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran 9. Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 10. Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan 11. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
						Rp 3,652,673,000	Rp -	TW II	1. Monitoring dan Pelaporan BMN 2. Pelaksanaan Kehumasan 3. Pelaksanaan Keptokoleran 4. Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan 5. Pengelolaan Pengadaan Barjas/UKPBJ 6. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian 7. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran 8. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 9. Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan 10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1. Laporan Hasil Survei Integritas Internal Organisasi Triwulan II 2. Laporan Monitoring dan Pelaporan BMN 3. Laporan Pelaksanaan Kehumasan 4. Laporan Pelaksanaan Keptokoleran 5. Laporan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan 6. Laporan Pengelolaan Pengadaan Barjas/UKPBJ 7. Laporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian 8. Laporan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran 9. Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 10. Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan 11. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
						Rp 3,652,673,000	Rp -	TW III	1. Monitoring dan Pelaporan BMN 2. Pelaksanaan Kehumasan 3. Pelaksanaan Keptokoleran 4. Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan 5. Pengelolaan Pengadaan Barjas/UKPBJ 6. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian 7. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran 8. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 9. Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan 10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1. Laporan Hasil Survei Integritas Internal Organisasi Triwulan III 2. Laporan Monitoring dan Pelaporan BMN 3. Laporan Pelaksanaan Kehumasan 4. Laporan Pelaksanaan Keptokoleran 5. Laporan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan 6. Laporan Pengelolaan Pengadaan Barjas/UKPBJ 7. Laporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian 8. Laporan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran 9. Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 10. Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan 11. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		

										Rp 3,652,673,000	Rp -	TW IV	1. Monitoring dan Pelaporan BMN 2. Pelaksanaan Kehumasan 3. Pelaksanaan Keprotokoleraan 4. Fasilitas Ketatalaksanaan dan Kelembagaan 5. Pengelolaan Pengadaan Barjas/UKPBJ 6. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian 7. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran 8. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 9. Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan 10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	TW IV		1. Laporan Hasil Survei Integritas Internal Organisasi Triwulan IV 2. Laporan Monitoring dan Pelaporan BMN 3. Laporan Pelaksanaan Kehumasan 4. Laporan Pelaksanaan Keprotokoleraan 5. Laporan Fasilitas Ketatalaksanaan dan Kelembagaan 6. Laporan Pengelolaan Pengadaan Barjas/UKPBJ 7. Laporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian 8. Laporan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran 9. Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 10. Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan 11. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
2	Meningkatnya PNBPDitjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPDitjen AHU di Kantor Wilayah	5%	Jumlah PNBPDitjen Tahun berjalan dikurangi Jumlah PNBPDitjen Tahun sebelumnya di bagi jumlah PNBPDitjen Tahun sebelumnya dikalo 100	1. Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah 2. Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	Rp 1,480,882,000	Rp 370,220,500	Rp -	TW I	1. Layanan kewarganegaraan 2. Pelantikan PPNS 3. Pelantikan Notaris 4. Layanan AHU lainnya 5. Migrasi data layanan AHU 6. Sosialisasi/diseminasi/FGD/Rakor/Seminar/Webinar/wo rkshop/pendalaman materi layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah 7. Publikasi, Pameran dan Helpdesk 8. Koordinasi 9. Advokasi Perkara terkait produk Layanan AHU di	TW I		Laporan Peningkatan PNBPDitjen AHU di Kantor Wilayah Triwulan I					
							Rp 370,220,500	Rp -	TW II	1. Layanan kewarganegaraan 2. Pelantikan PPNS 3. Pelantikan Notaris 4. Layanan AHU lainnya 5. Migrasi data layanan AHU 6. Sosialisasi/diseminasi/FGD/Rakor/Seminar/Webinar/wo rkshop/pendalaman materi layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah 7. Publikasi, Pameran dan Helpdesk 8. Koordinasi 9. Advokasi Perkara terkait produk Layanan AHU di	TW II		Laporan Peningkatan PNBPDitjen AHU di Kantor Wilayah Triwulan II					
							Rp 370,220,500	Rp -	TW III	1. Layanan kewarganegaraan 2. Pelantikan PPNS 3. Pelantikan Notaris 4. Layanan AHU lainnya 5. Migrasi data layanan AHU 6. Sosialisasi/diseminasi/FGD/Rakor/Seminar/Webinar/wo rkshop/pendalaman materi layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah 7. Publikasi, Pameran dan Helpdesk 8. Koordinasi 9. Advokasi Perkara terkait produk Layanan AHU di	TW III		Laporan Peningkatan PNBPDitjen AHU di Kantor Wilayah Triwulan III					
							Rp 370,220,500	Rp -	TW IV	1. Layanan kewarganegaraan 2. Pelantikan PPNS 3. Pelantikan Notaris 4. Layanan AHU lainnya 5. Migrasi data layanan AHU 6. Sosialisasi/diseminasi/FGD/Rakor/Seminar/Webinar/wo rkshop/pendalaman materi layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah 7. Publikasi, Pameran dan Helpdesk 8. Koordinasi 9. Advokasi Perkara terkait produk Layanan AHU di	TW IV		Laporan Peningkatan PNBPDitjen AHU di Kantor Wilayah Triwulan IV					
3	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	88%	Jumlah laporan Pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100	Pengawasan kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	Rp 1,205,004,000	Rp 301,251,000	Rp -	TW I	1. Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPW 2. Pelantikan MPW 3. Rakor MPW, MPD 4. Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPD 5. Pelantikan MPD 6. Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MKNW	TW I		Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Triwulan I					
							Rp 301,251,000	Rp -	TW II	1. Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPW 2. Pelantikan MPW 3. Rakor MPW, MPD 4. Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPD 5. Pelantikan MPD 6. Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MKNW	TW II		Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Triwulan II					

						Rp	301,251,000	Rp	-	TW III	1. Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPW 2. Pelantikan MPW 3. Rakor MPW, MPD 4. Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPD 5. Pelantikan MPD 6. Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MKNW	TW III		Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Triwulan III			
						Rp	301,251,000	Rp	-	TW IV	1. Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPW 2. Pelantikan MPW 3. Rakor MPW, MPD 4. Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPD 5. Pelantikan MPD 6. Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MKNW	TW IV		Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Triwulan IV			
4	Terselenggaranya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks	Realisasi Indeks Penegakan Hukum dibagi target dikali 100	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	Rp	211,818,000	Rp	52,954,500	-	TW I	1. Kerjasama Pemantauan/Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual dengan Instansi Terkait 2. Pemantauan/Pengawasan Kekayaan Intelektual Lainnya 3. Pendampingan Penanganan Aduan Pelanggaran HKI di Wilayah 4. Evaluasi dan Pelaporan Penegakan Hukum KI di Wilayah	TW I		Laporan Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah		
						Rp	52,954,500	Rp	-	TW II	1. Kerjasama Pemantauan/Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual dengan Instansi Terkait 2. Pemantauan/Pengawasan Kekayaan Intelektual Lainnya 3. Pendampingan Penanganan Aduan Pelanggaran HKI di Wilayah 4. Evaluasi dan Pelaporan Penegakan Hukum KI di Wilayah	TW II		Laporan Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah			
						Rp	52,954,500	Rp	-	TW III	1. Kerjasama Pemantauan/Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual dengan Instansi Terkait 2. Pemantauan/Pengawasan Kekayaan Intelektual Lainnya 3. Pendampingan Penanganan Aduan Pelanggaran HKI di Wilayah 4. Evaluasi dan Pelaporan Penegakan Hukum KI di Wilayah	TW III		Laporan Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah			
						Rp	52,954,500	Rp	-	TW IV	1. Kerjasama Pemantauan/Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual dengan Instansi Terkait 2. Pemantauan/Pengawasan Kekayaan Intelektual Lainnya 3. Pendampingan Penanganan Aduan Pelanggaran HKI di Wilayah 4. Evaluasi dan Pelaporan Penegakan Hukum KI di Wilayah	TW IV		Laporan Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah			

5	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap KI di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami KI terhadap Total Masyarakat yang Mendapatkan Diseminasi/ Edukasi tentang KI di Wilayah	70%	Realisasi Persentase Masyarakat yang Memahami KI terhadap Total Masyarakat yang Mendapatkan Diseminasi/ Edukasi tentang KI di Wilayah dibagi target dikali 100	Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	Rp	901,101,000	Rp	225,275,250	Rp	-	TW I	1. Promosi dan Diseminasi Indikasi Geografis 2. Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal 3. Workshop Kekayaan Intelektual Lainnya 4. Pelaksanaan Agenda RuKI (Guru Kekayaan Intelektual) 5. Penyebarluasan Informasi Kekayaan Intelektual 6. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KI di Wilayah 7. Edukasi Pencegahan Pelanggaran HKI ke pelaku Usaha di wilayah	TW I	Laporan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah		
						Rp	225,275,250	Rp	-	TW II	1. Promosi dan Diseminasi Indikasi Geografis 2. Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal 3. Workshop Kekayaan Intelektual Lainnya 4. Pelaksanaan Agenda RuKI (Guru Kekayaan Intelektual) 5. Penyebarluasan Informasi Kekayaan Intelektual 6. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KI di Wilayah 7. Edukasi Pencegahan Pelanggaran HKI ke pelaku Usaha di wilayah	TW II	Laporan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah				
						Rp	225,275,250	Rp	-	TW III	1. Promosi dan Diseminasi Indikasi Geografis 2. Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal 3. Workshop Kekayaan Intelektual Lainnya 4. Pelaksanaan Agenda RuKI (Guru Kekayaan Intelektual) 5. Penyebarluasan Informasi Kekayaan Intelektual 6. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KI di Wilayah 7. Edukasi Pencegahan Pelanggaran HKI ke pelaku Usaha di wilayah	TW III	Laporan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah				
						Rp	225,275,250	Rp	-	TW IV	1. Promosi dan Diseminasi Indikasi Geografis 2. Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal 3. Workshop Kekayaan Intelektual Lainnya 4. Pelaksanaan Agenda RuKI (Guru Kekayaan Intelektual) 5. Penyebarluasan Informasi Kekayaan Intelektual 6. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KI di Wilayah 7. Edukasi Pencegahan Pelanggaran HKI ke pelaku Usaha di wilayah	TW IV	Laporan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah				
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17%	Realisasi Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah dibagi target dikali 100	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Rp	845,700,000	Rp	211,425,000	Rp	-	TW I	1. Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual 2. Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual 3. Koordinasi dengan Instansi Terkait 4. Mobile IP Clinic di Wilayah 5. Evaluasi dan Pelaporan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW I	Laporan Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah		
						Rp	211,425,000	Rp	-	TW II	1. Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual 2. Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual 3. Koordinasi dengan Instansi Terkait 4. Mobile IP Clinic di Wilayah 5. Evaluasi dan Pelaporan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW II	Laporan Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah				
						Rp	211,425,000	Rp	-	TW III	1. Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual 2. Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual 3. Koordinasi dengan Instansi Terkait 4. Mobile IP Clinic di Wilayah 5. Evaluasi dan Pelaporan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW III	Laporan Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah				
						Rp	211,425,000	Rp	-	TW IV	1. Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual 2. Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual 3. Koordinasi dengan Instansi Terkait 4. Mobile IP Clinic di Wilayah 5. Evaluasi dan Pelaporan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW IV	Laporan Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah				
6	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	Realisasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham dibagi target dikali 100	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	Rp	252,354,000	Rp	63,088,500	Rp	-	TW I	1. Persiapan Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah 2. Koordinasi dengan Instansi Terkait di daerah 3. Pelaksanaan Harmonisasi 4. Pemetaan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah 5. Kajian Peraturan Daerah 6. Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah 7. Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah 8. Pelaporan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah	TW I	Laporan Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah		

							Rp	63,088,500	Rp	-	TW II	1.Persiapan Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah 2. Koordinasi dengan Instansi Terkait di daerah 3. Pelaksanaan Harmonisasi 4. Pemetaan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah 5. Kajian Peraturan Daerah 6. Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah 7. Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan PerundangUndangan di Daerah	TW II	Laporan Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah			
							Rp	63,088,500	Rp	-	TW III	1.Persiapan Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah 2. Koordinasi dengan Instansi Terkait di daerah 3. Pelaksanaan Harmonisasi 4. Pemetaan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah 5. Kajian Peraturan Daerah 6. Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah 7. Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan PerundangUndangan di Daerah	TW III	Laporan Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah			
							Rp	63,088,500	Rp	-	TW IV	1.Persiapan Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah 2. Koordinasi dengan Instansi Terkait di daerah 3. Pelaksanaan Harmonisasi 4. Pemetaan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah 5. Kajian Peraturan Daerah 6. Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah 7. Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan PerundangUndangan di Daerah	TW IV	Laporan Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah			
7	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	Realisasi Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan dibagi target dikali 100	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	Rp	119,646,000	Rp	29,911,500	Rp	-	TW I	1.Penilaian Angka Kredit Perancang PUU di Daerah 2. Pendalaman Materi Pembinaan Perancang dan Perancangan Peraturan Daerah 3. Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan PerundangUndangan 4. Penilaian Indeks Reformasi Hukum	TW I	Laporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah		
							Rp	29,911,500	Rp	-	TW II	1.Penilaian Angka Kredit Perancang PUU di Daerah 2. Pendalaman Materi Pembinaan Perancang dan Perancangan Peraturan Daerah 3. Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan PerundangUndangan 4. Penilaian Indeks Reformasi Hukum	TW II	Laporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah			
							Rp	29,911,500	Rp	-	TW III	1.Penilaian Angka Kredit Perancang PUU di Daerah 2. Pendalaman Materi Pembinaan Perancang dan Perancangan Peraturan Daerah 3. Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan PerundangUndangan 4. Penilaian Indeks Reformasi Hukum	TW III	Laporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah			
							Rp	29,911,500	Rp	-	TW IV	1.Penilaian Angka Kredit Perancang PUU di Daerah 2. Pendalaman Materi Pembinaan Perancang dan Perancangan Peraturan Daerah 3. Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan PerundangUndangan 4. Penilaian Indeks Reformasi Hukum	TW IV	Laporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah			
8	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	Realisasi Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM dibagi target dikali 100	1.Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 2. Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM 3. Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah	Rp	201,758,000	Rp	50,439,500	Rp	-	TW I	1. Identifikasi dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 2. Koordinasi dan Konsultasi dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 3. Penyusunan Rekomendasi Penanganan dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanganan dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 5. Pelaksanaan Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah 6. Pelaksanaan Aksi HAM di Wilayah	TW I	1. Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 2. Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM 3. Laporan Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah		
							Rp	50,439,500	Rp	-	TW II	1. Identifikasi dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 2. Koordinasi dan Konsultasi dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 3. Penyusunan Rekomendasi Penanganan dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanganan dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 5. Pelaksanaan Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah 6. Pelaksanaan Aksi HAM di Wilayah	TW II	1. Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 2. Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM 3. Laporan Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah			

						Rp	50,439,500	Rp	-	TW III	1. Identifikasi dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 2. Koordinasi dan Konsultasi dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 3. Penyusunan Rekomendasi Penanganan dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanganan dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 5. Pelaksanaan Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah 6. Pelaksanaan Aksi HAM di Wilayah	TW III		1. Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 2. Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM 3. Laporan Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah		
						Rp	50,439,500	Rp	-	TW IV	1. Identifikasi dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 2. Koordinasi dan Konsultasi dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 3. Penyusunan Rekomendasi Penanganan dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanganan dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 5. Pelaksanaan Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah 6. Pelaksanaan Aksi HAM di Wilayah	TW IV		1. Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah 2. Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM 3. Laporan Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah		
	Jumlah Kab/ Kota Peduli HAM	2 Instansi Pemerintah	Realisasi Jumlah Kab/ Kota Peduli HAM dibagi target dikali 100	Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah	Rp	56,921,000	Rp	14,230,250	Rp	-	TW I	1. Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM 3. Pemantauan dan Evaluasi Kab/Kota Peduli HAM	TW I	Laporan Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah		
							Rp	14,230,250	Rp	-	TW II	1. Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM 3. Pemantauan dan Evaluasi Kab/Kota Peduli HAM	TW II	Laporan Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah		
							Rp	14,230,250	Rp	-	TW III	1. Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM 3. Pemantauan dan Evaluasi Kab/Kota Peduli HAM	TW III	Laporan Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah		
							Rp	14,230,250	Rp	-	TW IV	1. Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM 3. Pemantauan dan Evaluasi Kab/Kota Peduli HAM	TW IV	Laporan Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah		
	Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah	Realisasi Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dibagi target dikali 100	Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	Rp	41,511,000	Rp	10,377,750	Rp	-	TW I	1. Persiapan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah 2. Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah 3. Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	TW I	Laporan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah		
							Rp	10,377,750	Rp	-	TW II	1. Persiapan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah 2. Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah 3. Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	TW II	Laporan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah		
							Rp	10,377,750	Rp	-	TW III	1. Persiapan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah 2. Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah 3. Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	TW III	Laporan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah		
							Rp	10,377,750	Rp	-	TW IV	1. Persiapan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah 2. Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah 3. Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	TW IV	Laporan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah		
9	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Wilayah	3 Rekomendasi	Realisasi Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah dibagi target dikali 100	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif HAM di Wilayah	Rp	49,658,000	Rp	12,414,500	Rp	-	TW I	1. Identifikasi Rancangan PUU berbasis HAM di Wilayah 2. Perumusan Rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah 3. Pemantauan dan Evaluasi hasil rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah	TW I	Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif HAM di Wilayah		
							Rp	12,414,500	Rp	-	TW II	1. Identifikasi Rancangan PUU berbasis HAM di Wilayah 2. Perumusan Rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah 3. Pemantauan dan Evaluasi hasil rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah	TW II	Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif HAM di Wilayah		
							Rp	12,414,500	Rp	-	TW III	1. Identifikasi Rancangan PUU berbasis HAM di Wilayah 2. Perumusan Rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah 3. Pemantauan dan Evaluasi hasil rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah	TW III	Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif HAM di Wilayah		

							Rp	12,414,500	Rp	-	TW IV	1. Identifikasi Rancangan PUU berbasis HAM di Wilayah 2. Perumusan Rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah 3. Pemantauan dan Evaluasi hasil rekomendasi R-PUU berbasis HAM di Wilayah	TW IV		Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif HAM di Wilayah			
	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Realisasi Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti dibagi target dikali 100	1. Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah 2. Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Rp	314,675,000	Rp	78,668,750		TW I	1. Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Analisis kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM 3. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK-IKM 4. Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah			1. Laporan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah 2. Laporan Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah			
								Rp	78,668,750		TW II	1. Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Analisis kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM 3. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK-IKM 4. Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah			1. Laporan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah 2. Laporan Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah			
								Rp	78,668,750		TW III	1. Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Analisis kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM 3. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK-IKM 4. Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah			1. Laporan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah 2. Laporan Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah			
								Rp	78,668,750		TW IV	1. Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Analisis kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM 3. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK-IKM 4. Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah			1. Laporan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah 2. Laporan Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah			
10	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Perda	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Kegiatan	Realisasi Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan dibagi target dikali 100	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	Rp	37,741,000	Rp	9,435,250	Rp	-	TW I	1. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum 2. Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	TW I		Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah		
								Rp	9,435,250	Rp	-	TW II	1. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum 2. Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	TW II		Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah		
								Rp	9,435,250	Rp	-	TW III	1. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum 2. Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	TW III		Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah		
								Rp	9,435,250	Rp	-	TW IV	1. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum 2. Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	TW IV		Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah		
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan	Realisasi Jumlah Fasilitasi Perencanaan Perda dibagi target dikali 100	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	Rp	88,036,000	Rp	22,009,000	Rp	-	TW I	1. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik 2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	TW I		Laporan Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah		
								Rp	22,009,000	Rp	-	TW II	1. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik 2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	TW II		Laporan Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah		
								Rp	22,009,000	Rp	-	TW III	1. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik 2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	TW III		Laporan Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah		
								Rp	22,009,000	Rp	-	TW IV	1. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik 2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	TW IV		Laporan Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah		
11	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDH di Wilayah	Persentase Anggota JDH yang Dikelola terhadap Total Anggota JDH di Wilayah	25%	Realisasi Persentase Anggota JDH yang Dikelola terhadap Total Anggota JDH di Wilayah dibagi target dikali 100	1. Pengelolaan anggota JDH di wilayah 2. Layanan penyuluhan hukum di Daerah 3. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum 4. Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	Rp	313,075,000	Rp	78,268,750	Rp	-	TW I	1. Pengelolaan anggota JDH di wilayah 2. Layanan penyuluhan hukum di Daerah 3. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum 4. Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	TW I		1. Laporan Pengelolaan anggota JDH di wilayah 2. Laporan Layanan penyuluhan hukum di Daerah 3. Laporan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum 4. Laporan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah		
								Rp	78,268,750	Rp	-	TW II	1. Pengelolaan anggota JDH di wilayah 2. Layanan penyuluhan hukum di Daerah 3. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum 4. Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	TW II		1. Laporan Pengelolaan anggota JDH di wilayah 2. Laporan Layanan penyuluhan hukum di Daerah 3. Laporan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum 4. Laporan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah		
								Rp	78,268,750	Rp	-	TW III	1. Pengelolaan anggota JDH di wilayah 2. Layanan penyuluhan hukum di Daerah 3. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum 4. Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	TW III		1. Laporan Pengelolaan anggota JDH di wilayah 2. Laporan Layanan penyuluhan hukum di Daerah 3. Laporan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum 4. Laporan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah		

							Rp	78,268,750	Rp	-	TW IV	1. Pengelolaan anggota JDHIN di wilayah 2. Layanan penyuluhan hukum di Daerah 3. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum 4. Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	TW IV		1. Laporan Pengelolaan anggota JDHIN di wilayah 2. Laporan Layanan penyuluhan hukum di Daerah 3. Laporan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum 4. Laporan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah			
12	Meningkatnya Layanan bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan bantuan Hukum Litigasi	82%	Realisasi Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan bantuan Hukum Litigasi dibagi target dikali 100	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Rp	712,000,000	Rp	178,000,000	Rp	-	TW I	1. Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa 2. Upaya Hukum Luar Biasa	TW I		Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi		
								Rp	178,000,000	Rp	-	TW II	1. Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa 2. Upaya Hukum Luar Biasa	TW II		Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi		
								Rp	178,000,000	Rp	-	TW III	1. Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa 2. Upaya Hukum Luar Biasa	TW III		Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi		
								Rp	178,000,000	Rp	-	TW IV	1. Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa 2. Upaya Hukum Luar Biasa	TW IV		Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi		
	Persentase Layanan bantuan Hukum Non-Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non-Litigasi	80%	Realisasi Persentase Layanan bantuan Hukum Non-Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non-Litigasi dibagi target dikali 100	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	Rp	138,710,000	Rp	34,677,500	Rp	-	TW I	1. Penyebarluasan Informasi dan Penanganan Perkara di luar Pengadilan 2. Konseling	TW I		Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi			
							Rp	34,677,500	Rp	-	TW II	1. Penyebarluasan Informasi dan Penanganan Perkara di luar Pengadilan 2. Konseling	TW II		Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi			
							Rp	34,677,500	Rp	-	TW III	1. Penyebarluasan Informasi dan Penanganan Perkara di luar Pengadilan 2. Konseling	TW III		Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi			
							Rp	34,677,500	Rp	-	TW IV	1. Penyebarluasan Informasi dan Penanganan Perkara di luar Pengadilan 2. Konseling	TW IV		Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi			
13	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria Sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah dibagi target dikali 100	70%	Realisasi Persentase Peningkatan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria Sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah dibagi target dikali 100	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	Rp	97,016,000	Rp	24,254,000	Rp	-	TW I	1. Penyiapan bahan kegiatan Penyuluhan Hukum 2. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum	TW I		Laporan Layanan penyuluhan hukum di Daerah		
								Rp	24,254,000	Rp	-	TW II	1. Penyiapan bahan kegiatan Penyuluhan Hukum 2. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum	TW II		Laporan Layanan penyuluhan hukum di Daerah		
								Rp	24,254,000	Rp	-	TW III	1. Penyiapan bahan kegiatan Penyuluhan Hukum 2. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum	TW III		Laporan Layanan penyuluhan hukum di Daerah		
								Rp	24,254,000	Rp	-	TW IV	1. Penyiapan bahan kegiatan Penyuluhan Hukum 2. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum	TW IV		Laporan Layanan penyuluhan hukum di Daerah		
15	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	83 Indeks	Nilai Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks	Melakukan Bintorwasdal terhadap pelayanan masyarakat pada satuan kerja	Rp	591,520,000	Rp	147,880,000	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal terhadap pelayanan masyarakat triwulan I	TW I		Laporan Bintorwasdal		
								Rp	147,880,000	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal terhadap pelayanan masyarakat triwulan I	TW II		Laporan Bintorwasdal		
								Rp	147,880,000	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal terhadap pelayanan masyarakat triwulan I	TW III		Laporan Bintorwasdal		
								Rp	147,880,000	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal terhadap pelayanan masyarakat triwulan I	TW IV		Laporan Bintorwasdal		
16	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai dengan Standar	85%	Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak dibagi Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak dikali 100%	Melakukan Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai dengan Standar	Rp	5,840,000	Rp	1,460,000			TW I	Melaksanakan monitoring Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai dengan Standar pada Lapas dan rutan	TW I		Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai dengan Standar pada Lapas dan Rutan		
								Rp	1,460,000	Rp	-	TW II	Melaksanakan monitoring Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai dengan Standar pada Lapas dan rutan	TW II		Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai dengan Standar pada Lapas dan rutan		
								Rp	1,460,000	Rp	-	TW III	Melaksanakan monitoring Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai dengan Standar pada Lapas dan rutan	TW III		Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai dengan Standar pada Lapas dan rutan		
								Rp	1,460,000	Rp	-	TW IV	Melaksanakan monitoring Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai dengan Standar pada Lapas dan rutan	TW IV		Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai dengan Standar pada Lapas dan rutan		
	Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	95%	Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak dikali 100%	Melakukan Pengawasan Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas pada Lapas dan Rutan Triwulan I	TW I		Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas pada Lapas dan Rutan Triwulan I			
							Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas pada Lapas dan Rutan Triwulan II	TW II		Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas pada Lapas dan Rutan Triwulan II			
							Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas pada Lapas dan Rutan Triwulan III	TW III		Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas pada Lapas dan Rutan Triwulan III			
							Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas pada Lapas dan Rutan Triwulan IV	TW IV		Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas pada Lapas dan Rutan Triwulan IV			

		Penyalahgunaan Narkotika		narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi dikali 100%			Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika Triwulan II			
							Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika Triwulan III			
							Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika Triwulan IV			
17	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i>	100%	Jumlah Tahanan <i>Overstaying</i> dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%	Melakukan Pengawasan Persentase Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i>	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i> Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i> Triwulan I		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i> Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i> Triwulan II		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i> Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i> Triwulan III		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i> Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i> Triwulan IV		
		Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyalahgunaan Hukum	100%	Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%	Melakukan Pengawasan Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyalahgunaan Hukum	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyalahgunaan Hukum Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyalahgunaan Hukum Triwulan I		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyalahgunaan Hukum Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyalahgunaan Hukum Triwulan II		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyalahgunaan Hukum Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyalahgunaan Hukum Triwulan III		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyalahgunaan Hukum Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyalahgunaan Hukum Triwulan IV		
		Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100%	Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%	Melakukan Pengawasan Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyalahgunaan Hukum	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Triwulan I		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Triwulan II		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Triwulan III		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Triwulan IV		
18	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian	75%	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali 100%	Melakukan Pengawasan Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyalahgunaan Hukum	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian Triwulan I		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian Triwulan II		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian Triwulan III		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian Triwulan IV		
		Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	100%	Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%	Melakukan Pengawasan Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Triwulan I		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Triwulan II		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Triwulan III		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Triwulan IV		
		Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	90%	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dikali 100%	Melakukan Pengawasan Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi Triwulan I		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi Triwulan II		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi Triwulan III		

						Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi Triwulan IV		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Triwulan I		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Triwulan II		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Triwulan III		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Triwulan IV		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Triwulan I		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Triwulan II		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Triwulan III		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Triwulan IV		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat Triwulan I		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat Triwulan II		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat Triwulan III		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat Triwulan IV		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Narapidana yang Bekerja dan Produktif Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Bekerja dan Produktif Triwulan I		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Narapidana yang Bekerja dan Produktif Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Bekerja dan Produktif Triwulan II		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Narapidana yang Bekerja dan Produktif Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Bekerja dan Produktif Triwulan III		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Narapidana yang Bekerja dan Produktif Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Narapidana yang Bekerja dan Produktif Triwulan IV		
19	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	90%	Menghitung Benda Sitaan Dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya adalah dengan Membagi Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran dibagi dengan jumlah Penilaian Deprisasi Basan Baran X 100%	Melakukan Pengawasan Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	Rp	5,817,000	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Triwulan I		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Triwulan II		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Triwulan III		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Triwulan IV		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Triwulan I		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Triwulan II		
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Triwulan III		

20	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Keterlibatan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90%	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%	Melakukan Pengawasan Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Triwulan IV			
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar Triwulan I			
									Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar Triwulan II		
									Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar Triwulan III		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar Triwulan IV			
		Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	90%	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi dikali 100%	Melakukan Pengawasan Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Triwulan I			
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Triwulan II			
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Triwulan III			
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Triwulan IV			
		Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%	Melakukan Pengawasan Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib Triwulan I			
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib Triwulan II			
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib Triwulan III			
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib Triwulan IV			
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	90%	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%	Melakukan Pengawasan Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Triwulan I			
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Triwulan II			
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Triwulan III			
							Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Triwulan IV				
21	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	70%	Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga dibagi Jumlah Klien Usia Produktif dikali 100%	Melakukan Pengawasan terhadap Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Secara Tuntas Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Secara Tuntas Triwulan I			
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Secara Tuntas Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Secara Tuntas Triwulan II			
									Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Secara Tuntas Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Secara Tuntas Triwulan III		
									Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Secara Tuntas Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Secara Tuntas Triwulan IV		
		Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	Jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara dibagi Jumlah Pendampingan Anak dikali 100%	Melakukan Pengawasan terhadap Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Triwulan I			
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Triwulan II			
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Triwulan III			
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Triwulan IV			
		Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	40%	Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan di dibagi Jumlah Klien Anak dikali 100%	Melakukan Pengawasan terhadap Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya Triwulan I			

							Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya Triwulan II			
							Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya Triwulan III			
							Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya Triwulan IV			
22	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengantasan Anak di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	85%	Jumlah Anak yang Terampil dibagi Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan dikali 100%	Melakukan Pengawasan terhadap Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Triwulan I		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Triwulan II		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Triwulan III		
								Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Triwulan IV		
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi dibagi Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi dikali 100%	Melakukan pengawasan terhadap Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Triwulan I			
							Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Triwulan II			
							Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Triwulan III			
							Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Triwulan IV			
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengasuhan dibagi Jumlah Anak dikali 100%	Melakukan pengawasan terhadap Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Triwulan I			
							Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan berkala terhadap Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Triwulan II			
							Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Triwulan III			
							Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Triwulan IV			
Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal dibagi jumlah anak dikali 100%	Melakukan Pengawasan terhadap Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	Rp	5,817,000	Rp	1,454,250	Rp	-	TW I	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal Triwulan I	TW I	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal Triwulan I				
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW II	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal Triwulan II	TW II	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal Triwulan II				
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW III	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal Triwulan III	TW III	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal Triwulan III				
						Rp	1,454,250	Rp	-	TW IV	Melaksanakan Bintorwasdal secara berkala terhadap Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal Triwulan IV	TW IV	Laporan penyelenggaraan pengawasan Layanan terhadap Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal Triwulan IV				
23	Meningkatnya Kualitas Layanan Perumahan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Perumahan (Lapas)	0 UPT	Jumlah UPT yang dibangun	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	TW I	-	TW I	-		
								Rp	-	Rp	-	TW II	-	TW II	-		
								Rp	-	Rp	-	TW III	-	TW III	-		
								Rp	-	Rp	-	TW IV	-	TW IV	-		
24	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 Indeks	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	Rp	1,467,077,000	Rp	366,769,250	Rp	-	TW I	1. Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama dan Evaluasi Bidang Teknis Keimigrasian dan Satuan Kerja Imigrasi 2. Penilaian Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian 3. Pelaporan	TW I	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian Triwulan I		
								Rp	366,769,250	Rp	-	TW II	1. Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama dan Evaluasi Bidang Teknis Keimigrasian dan Satuan Kerja Imigrasi 2. Penilaian Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian 3. Pelaporan	TW II	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian Triwulan II		
								Rp	366,769,250	Rp	-	TW III	1. Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama dan Evaluasi Bidang Teknis Keimigrasian dan Satuan Kerja Imigrasi 2. Penilaian Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian 3. Pelaporan	TW III	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian Triwulan III		
								Rp	366,769,250	Rp	-	TW IV	1. Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama dan Evaluasi Bidang Teknis Keimigrasian dan Satuan Kerja Imigrasi 2. Penilaian Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian 3. Pelaporan	TW IV	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian Triwulan IV		

	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 Indeks	Perhitungan Menggunakan Metode Survei Berbasis Aplikasi yang Dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan Interval Target 1,00 - 4,00	1. Operasi Bidang Keamanan 2. Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	Rp	1,083,318,000	Rp	270,829,500	Rp	-	TW I	1. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah 2. Operasi Mandiri di Wilayah 3. Operasi Gabungan di Wilayah 4. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah 5. Pengawasan Orang Asing	TW I		Laporan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah			
								Rp	270,829,500	Rp	-	TW II	1. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah 2. Operasi Mandiri di Wilayah 3. Operasi Gabungan di Wilayah 4. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah 5. Pengawasan Orang Asing	TW II		Laporan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		
								Rp	270,829,500	Rp	-	TW III	1. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah 2. Operasi Mandiri di Wilayah 3. Operasi Gabungan di Wilayah 4. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah 5. Pengawasan Orang Asing	TW III		Laporan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		
								Rp	270,829,500	Rp	-	TW IV	1. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah 2. Operasi Mandiri di Wilayah 3. Operasi Gabungan di Wilayah 4. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah 5. Pengawasan Orang Asing	TW IV		Laporan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		



Kepala Kantor Wilayah,

Ignatius Purwanto
NIP 196703161992031001